

Pencairan Banpol Jalan Terus

● Tak Ada Rekomendasi BPK

SEMARANG - Pencairan dana bantuan politik (Banpol) untuk Partai Golkar Kabupaten Demak TA 2010-2012 terus dilakukan karena tidak ada temuan penyimpangan ataupun rekomendasi BPK untuk menghentikan bantuan tersebut. Bahkan di tahun 2010 masih terdapat kelebihan dana Rp 10 juta lebih dari nilai nominal dana bantuan Rp 133,6 juta.

"Selama BPK tidak memberikan rekomendasi apapun kita tetap mencairkan. Dasarnya dari laporan tersebut, sepanjang tidak ada masalah dana dicairkan untuk tahun selanjutnya," kata staf Hubungan Antarlembaga Kesbangpolinmas Demak, Demak Rifah Utami di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (3/8).

Rifah menjadi saksi untuk terdakwa Wakil Ketua DPRD Demak Budi Achmadi yang disidangkan atas kasus dugaan penyimpangan dana banpol

Partai Golkar Demak TA 2010-2012. Di hadapan majelis hakim Alimin R Sudjono didampingi Gatot Susanto dan Kalimatul Jumro, saksi menyatakan, meski sudah dinyatakan secara umum tidak ada masalah, pengurus partai Sutejo (bendahara) ingin mengembalikan bantuan keuangan tahun 2010 di mana terdapat kelebihan dana tadi untuk item perjalanan dinas dan pemberian uang saku.

"Awal 2013 berkoordinasi dengan Tedjo dan dia datang dengan membawa Lpj 2010. Saya sudah menyampaikan bahwa tidak ada rekomendasi BPK dan uang yang dikembalikan disetor di kasda sudah tidak bisa diambil kembali," kata Rifah.

Bernuansa Politis

Ditambahkan, sebelumnya pengurus partai Golkar, Agus Indarto juga sempat berkonsultasi soal Lpj dalam hal boleh tidaknya gaji karyawan dimasukkan ke

dalam laporan.

Namun disampaikan bahwa gaji tidak boleh dimasukkan karena sudah diatur dalam Permendagri tetapi jika perjalanan dinas diperbolehkan.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Theodorus Yosef Parera di akhir sidang kembali meminta kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan soal penangguhan penahanan terhadap kliennya setelah mendengarkan keterangan dari para saksi-saksi yang sudah dihadirkan ke muka persidangan.

Budi Achmadi usai sidang menyatakan, permasalahan yang membawanya ke meja hijau ini sangatlah subjektif dan bermuansa politis karena menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurutnya, dirinya sebagai ketua partai mempercayakan penuh untuk setiap agenda kepada Wakil Sekretaris II DPD Golkar Bidang Pemenangan Pemilu, Agus Indarto.

Apapun yang diputuskan ketua juga merupakan *collective collegial* yang artinya dihasilkan secara bersama-sama dalam rapat kepengurusan.

"Pembuatan Lpj semuanya juga dari hasil keputusan rapat pengurus. Saya percaya penuh kepada Agus dalam menjalankan agenda-agenda Golkar. Kita juga tahu BPK tidak mengeluarkan rekomendasi apapun dan menjadi dasar pencairan selanjutnya," papar Budi.

Ditambahkan, di tahun 2010 bahkan Golkar Demak mempunyai kelebihan kuitansi dari Rp 10 juta lebih sehingga menurutnya sangat aneh jika dianggap korupsi.

"Ada uang lebih Rp 10 juta sangat aneh kalau dianggap korupsi. Saya Januari jadi ketua, uang cair di Desember tentu partai nomboki dulu kalau tidak ada yang mau pasti ketuanya yang maju. Tidak ada Lpj fiktif," imbuhnya. (J14,J17-72)